TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM KERJA PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASER

TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

Gelar Magister Ilmu Administrasi Publik

Disusun Oleh :

DECY MUTIA SUHARTINI

NIM. 530077976

SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2025

ABSTRACT

One of the Government's efforts to create effective and efficient governance is through the implementation of bureaucratic reform, which is realized through three main simplification programs: organizational structure simplification, position equalization, and work system adjustment. Unfortunately, this reform has not yet achieved optimal results. This study aims to analyze the implementation of the work system policy, which represents the final stage of bureaucratic simplification in the Paser District Government, based on the policy implementation theory of Van Meter and Van Horn. The research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, document reviews, and field observations.

The findings indicate that the implementation of the work system policy is still at the early implementation stage, characterized by an administrative-formalistic approach that has not yet reached the substantive-transformational aspect, which is the main goal of the work system policy. Although the East Kalimantan Governor Regulation (Pergub) No. 50 of 2023 and the Paser Regent Regulation (Perbup) No. 9 of 2024 have been issued, the policy has not yet been disseminated. Limited supporting resources, weak communication, the absence of operational instruments, and low implementer disposition have resulted in minimal impact on the transformation of the civil servants' work system. To optimize the implementation of this policy, a systemic approach is required, targeting both structural and cultural aspects so that the transformation of the work system can be realized comprehensively. This includes strengthening institutional capacity, building stakeholder commitment through structured coordination, and integrating all necessary resources (human, technological, informational, and financial) to support the implementation of the work system policy.

Keywords: *Work System Policy Implementation, Bureaucratic Reform, and Paser District Government*

ABSTRAK

Salah satu upaya dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien adalah dengan melaksanakan reformasi birokrasi yang diwujudkan melalui 3 tahap penyederhanaan birokrasi yakni penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja. Sayangnya, reformasi masih belum memperoleh hasil yang optimal. Penelitian bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan sistem kerja yang merupakan tahapan akhir dalam penyederhanaan birokrasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Paser berdasarkan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif di mana pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, telaahan dokumen dan observasi di lapangan.

Hasil penelitian penelitian menunjukkan implementasi kebijakan sistem kerja masih berada pada tahap awal (*early implementation stage*) yang bersifat administratif-formalistik belum menyentuh aspek substantif-tranformasional yang menjadi tujuan kebijakan sistem kerja. Dengan dikeluarkannya Pergub Kaltim Nomor 50 tahun 2023 dan diturunkan ke dalam Perbup Paser yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Paser nomor 9 tahun 2024 namun hingga sampai saat ini, kebijakan ini belum disosialisasikan, ditambah dengan terbatasnya sumber daya pendukung, lemahnya komunikasi, belum adanya instrument operasional serta disposisi pelaksana yang masih rendah membuat kebijakan belum berdampak *significant* terhadap perubahan sistem kerja ASN. Untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan sistem kerja ini diperlukan pendekatan sistemik yang menyasar pada aspek struktural dan kultural agar transformasi sistem kerja dapat menjadi nyata dan merata, mulai dari penguatan kapasitas lembaga, komitmen pemangku kepentingan melalui koordinasi yang terstruktur dan mengintegrasikan seluruh sumber daya yang diperlukan (sumber daya manusia, teknologi dan informasi serta anggaran) untuk membantu kebutuhan implementasi kebijakan sistem kerja.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan Sistem Kerja, Reformasi Birokrasi dan Pemda Kabupaten Paser.

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Kerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Paser
adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.
Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Tana Paser, Desember 2025
Yang Menyatakan



(Decy Mutia Suhartini, S.Pi)
NIM. 530077976

PERSETUJUAN TAPM
PASCA UJIAN SIDANG

Judul TAPM	: Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Kerja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Paser
Penyusun TAPM	: Decy Mutia Suhartini, S.Pi
NIM	: 530077976
Program Studi	: Magister Ilmu Administrasi Publik
Hari/Tanggal	: Selasa / 16 Desember 2025

Menyetujui :

Pembimbing II

Dr. Rina Yulianti, M.Si
NIP. 19740705 200604 2 011

Pembimbing I

Dr. Agus Priyanto, M.Si
NIDN. 0024056703

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu
Administrasi Publik
Program Pascasarjana

Prof. Dr. Siti Aisyah, M.Si
NIP. 19640722 198903 1 019

Direktur
Program Pascasarjana

Prof. Dr. Maman Rumanta, M.Si
NIP. 19630509 198903 1 002

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PORGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN HASIL UJIAN SIDANG

Nama	: Decy Mutia Suhartini, S.Pi / 530077976
NIM	: 530077976
Program Studi	: Ilmu Administrasi Publik
Judul TAPM	: Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Kerja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Paser

TAPM telah dipertahakan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Ilmu Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada

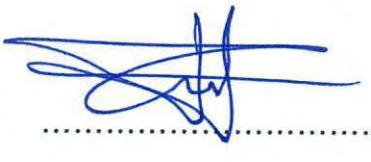
Hari/Tanggal	: Selasa / 16 Desember 2025
Waktu	: 09.00 – 10.30 WIB

Dan telah dinyatakan LULUS

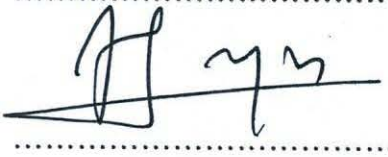
PANITIA PENGUJI TAPM

Tandatangan

Ketua Komisi Penguji
Nama : Drs. Rusna Ristasa, M.Pd ..... 

Penguji Ahli
Nama : Prof. Dr. Taufiqurokhman, S.H., A.Ks., S.Sos., M.Si ..... 

Pembimbing I
Nama : Dr. Agus Priyanto, M.Si ..... 

Pembimbing II
Nama : Dr. Rina Yulianti, S.IP., M.Si ..... 

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat dan kasih sayangNya maka penyelesaian tesis yang berjudul "Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Kerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Paser". Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada program studi Manajemen Administrasi Publik pada Perguruan Tinggi Universitas Terbuka.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya atas arahan, bimbingan, dan masukan dari berbagai pihak khususnya kepada Dosen pembimbing sebagai berikut :

1. Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Dr. Siti Aisyah, M.Si beserta seluruh staf yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan menyusun tesis di Universitas Terbuka
2. Bapak Dr. Agus Priyanto, M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Rina Yulianti, M.Si selaku pembimbing II yang telah bekerja keras dan penuh kesabaran memberikan bimbingan serta arahan dalam penyusunan tesis ini
3. Serta seluruh pihak yang telah memberikan ijin, bantuan dan pengetahuan serta pengalaman dalam penyusunan tesis ini.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan menjadi amal kebaikan dan mendapatkan balasan selayaknya dari Allah SWT serta selalu mendapatkan bimbingan, pertolongan-Nya dalam tugas sehari-hari.

Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua.

Tana Paser, 09 Desember 2025

Penulis

DAFTAR PUSTAKA

Ati, S., Tahmawati, N., & Setiawan, R. (2023). *Manajemen Informasi dan Transformasi Digital*. Bandung : Alfabeta.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser. *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023*. Tanah Grogot : Pemerintah Kabupaten Paser.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat. (2022). *Laporan Kajian Strategi Aantisipasi Dampak Pasca Implementasi Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi Tahun 2022*. Bandung: Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Bramantyo, A. & Mardjoeki. (2020). *Urgensi Penyederhanaan Birokrasi dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi*. Yogyakarta: Percetakan Pohon Cahaya.

Creswell, J. W. (2017). *Research design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Edisi ketiga). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser. (2023). *Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Paser Tahun 2023*. Tanah Grogot : Pemerintah Kabupaten Paser.

Dwiyanto, Agus. (2006). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Handayani, Y. (2023). *Kebijakan Penyetaraan Jabatan dalam Mewujudkan Efektivitas Sistem Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Paser* (Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Lampung).

Kasmad, R. (2018). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

LAN RI. (2021). Kajian Sanri : *Organisasi yang tangkas menurut McKinsey. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.*

LAN RI. (2021). *Telaahan Strategis : Implementasi Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi di Daerah*. Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah.

Listyarini, S. *et al.* (2017). *Panduan Penulisan Proposal dan TAPM*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Miles, M.B., Huberman, A.M., & Saldana, J. (2014). *Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru ITerj*. Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta : UI Press.

Natika, L. (2011). *Implementasi Kebijakan terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Subang* (Skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Subang).

Nisa, L. S., Setyati, S., Siska, D., & Fitriyanti, S. (2022). Analisis implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkup Pemerintah Provinsi

Kalimantan Selatan. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, *17*(2), 167–184.

Nugroho, Riant. (2018). *Public Policy : Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan.* Jakarta : Elex Media Komputindo.

Nursapiah, Harahap. (2020). *Penelitian Kualitatif.* Medan, Sumatera Utara : Wal ashri Publishing.

Umasugi, R. *dkk.* (2017). *Pengaruh Reformasi Struktur Birokrasi terhadap Kinerja Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Manado* (Skripsi, Jurusan Ilmu Administrasi, FISIPOL, Universitas Sam Ratulangi, Manado).

Pratama, A., dkk. (2022). Pengaruh penyederhanaan birokrasi terhadap kepuasan kerja dan dampaknya pada kinerja pegawai di lingkup BPS se-Provinsi Maluku Utara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan.*

Rifa'i, A., dkk. (2021). Persepsi pegawai terhadap implementasi manajemen talenta di organisasi pemerintahan. *Jurnal Aplikasi Manajemen dan Bisnis*, *7*(2)

Saryono. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Bidang Kesehatan.* Jakarta : Nuha Medika.

Soetaminah. (1991). *Pengantar Ilmu Perpustakaan dan Informasi.* Yogyakarta : Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada.

Subarsono, A.G. (2011). *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi.* Jakarta : Pustaka Belajar.

Suhardini, D. (2017). Persepsi pustakawan tentang Permenpan Nomor 9 Tahun 2014 terhadap kinerja pustakawan. *Edulib*, *7*(1).

Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.* Yogyakarta: Arifin Tahir.